

Majalah Tri Wulan
Prodi Ekonomi Syariah
STAIN Kudus

Muamalat

Inspirasi
Ekonomi
Syariah

Vol. 2 No. 4
Okt - Des
2014



PRODUK
SIMPANAN BANK
SYARIAH

REKSADANA SYARIAH
SEBAGAI ALTERNATIF
STRATEGI INVESTASI

MENGENAL
KONSEP
EKONOMI ISLAM

MENUJU ORANG
YANG SUKSES
BERKELANJUTAN

Daftar Isi

- OPTIMALISASI PELAPORAN PAJAK MELALUI MODERNISASI PENYAMPAIAN SISTEM SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN E-SPT ~ 4
Suhadi
- PETA PEMIKIRAN SISTEM SOSIALISME ~ 9
Muhammad Mustaqim
- ANALISIS HUKUM KOPERASI ~ 15
Ila Vera Sophya, M. Pd
- MENGENAL KONSEP EKONOMI ISLAM ~ 20
Rini Dewi Susanti, M.Ag., M.Pd
- KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI SUATU BARANG ~ 26
Setyaningsih
- PERAN BAITUL MAL WAT-TAMWIL (BMT) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN ~ 31
Anita Rahmawaty
- REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGI INVESTASI ~ 39
Muhammad Husni M.
- PRODUK SIMPANAN BANK SYARIAH ~ 44
Irsad Andriyanto, M.Si.
- PENYALURAN NAFSU SEKSUAL DALAM TEROPONG HUKUM ISLAM ~ 51
Fathul Mufta
- HUBUNGAN KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI, STRES KERJA DAN TURNOVER INTENTION: SUATU PENGANTAR ~ 56
Mahbur Rokhman
- PERANAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM INDONESIA ~ 62
Joesef Arifin
- PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL ~ 68
Junaidi Abdullah
- MENUJU ORANG YANG SUKSES BERKELANJUTAN ~ 74
Karebet Gunawan
- FONDASI EKONOMI MANDIRI DENGAN PENANAMAN PENDIDIKAN KEWIRALUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA ~ 79
Lina Kushidayati
- ILMUISASI ISLAM SOLUSI ANOMALI EKONOMI SYARIAH ~ 86
Nur Said
- PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH ~ 91
Ahmad Zaini
- RAKSASA TIDUR ITU...INDONESIA ~ 96
Elzawati Rahayu Ningsih, SH, MM
- "MEMBELI" SURGA DENGAN UANG ~ 100
Dr. M. Soekani Mhuchib, S.Ag, M.Pd
- GADAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ~ 106
Shobirin, S.Ag, M.Ag
- PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA SYARIAH: MENJARANG PELUANGNYA DALAM INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH DUNIA ~ 112
Tarandya Zulhi Amalia

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH MUAMALAT

Vol. 2, No. 4, Oktober-Desember 2014

Penanggung Jawab

Shobirin, M.Ag.

Redaktur

Suhadi, SE, MSA

H. M. Husni Mubarak, SE, MM

Penyunting

Karebet Gunawan, SE, MM

Amirus Sodik, Lc., M.A.

Desain Grafis & Fotografer

Rosita Afiany, SE

Lina Kushidayati, SHI, MA

Sekretariat

Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum

Irsad Andriyanto, SE, M.Si.

Majalah Tri Wulan Muamalat
diterbitkan oleh Prodi
Ekonomi Syari'ah
STAIN Kudus



PERAN BAITUL MAL WAT-TAMWIL (BMT) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Oleh: Anita Rahmawaty

Pendahuluan

Problem kemiskinan merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji, didiskusikan serta dicarikan solusinya. Problem ini masih menjadi isu sentral bukan hanya karena jumlahnya yang meningkat, melainkan juga dimensinya semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia (Sriharini, 2007: 109). Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014 menunjukkan bahwa pada September 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47%), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 sebanyak 28,07 juta orang (11,37%). Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin pada September 2013 mengalami peningkatan dibanding enam bulan sebelumnya.

Secara historis, kemiskinan

itu muncul sebagai akibat dari model pembangunan di Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan (*economic overtone*) dan mengabaikan perhatian pada aspek budaya kehidupan bangsa. Konsep 'trickle down effects', jargon pembangunan yang menonjol dalam paradigma saat itu, menyebabkan kemiskinan menjadi konsep yang tabu untuk didiskusikan secara terbuka. Dalam perkembangannya, orientasi kepada pertumbuhan diseimbangkan dengan orientasi pada pemerataan, salah satunya tampak dari kebijakan delapan jalur pemerataan dan program-program spesifik penanggulangan kemiskinan (Sriharini, 2007: 109).

Pada perkembangan berikutnya, terjadi pergeseran paradigma ke arah pemberdayaan masyarakat, di mana orang miskin tidak lagi dilihat sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku pembangunan dan proses pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas

sumber daya manusia. Konsep 'people centered development' dan 'bottom-up development planning' menjadi wacana pembangunan populer dan banyak diadopsi dalam proses kebijakan publik. Selanjutnya, berkembang wacana pengarusutamaan kemiskinan, di mana kemiskinan harus didekati melalui penerapan strategi yang komprehensif, yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan keamanan (Sriharini, 2007: 110).

Kajian ini menguraikan tentang peran dan fungsi Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dalam mengentaskan kemiskinan. Kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah dapat dijadikan sebagai alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Hal ini mengingat BMT telah terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Harapannya, kajian ini dapat mengoptimalkan peran BMT dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Definisi dan Dimensi Kemiskinan

Definisi kemiskinan banyak dikemukakan oleh para ahli. Ada sebagian yang mendefinisikan kemiskinan secara spesifik, namun ada juga yang mengartikan kemiskinan dalam lingkup yang

luas dengan memasukkan dimensi-dimensi sosial dan moral. Edwin G. Dolan (dalam Soekarni, 2005: 124) mengemukakan 3 definisi mengenai kemiskinan, yaitu: (1) kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan (*standard of living*); (2) rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yaitu relatif rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat; dan (3) kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.

Secara umum, kemiskinan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antar kelompok yang mungkin tidak miskin karena memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang miskin karena memiliki tingkat

pendapatan relatif lebih rendah dari garis kemiskinan (Ridwan, 2004: 4-5).

Edi Suharto (dalam Sriharini, 2007: 111) mengilustrasikan hal ini, jika batas kemiskinan suatu masyarakat, misalnya Rp. 100.000 per-bulan dapat dianggap tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 200.000 per-bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk dalam kategori miskin. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun demikian, menurut Nugroho (dalam Sriharini, 2007: 111) bahwa yang sering menjadi alat utama ukuran kemiskinan adalah ukuran kemiskinan absolut.

Kriteria yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur garis kemiskinan absolut adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan setara dengan 2.100 kalori perkapita per-hari. Selanjutnya, BPS menentukan batas kemiskinan dengan nilai konsumsi yang setara dengan beras sebanyak 320 kg per-kapita per-tahun di pedesaan dan 480 kg per-kapita per-tahun di daerah perkotaan. Saat ini, BPS menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran untuk komoditas pangan dan non pangan.

Komoditas pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa (Soekarni, 2005: 127).

Penggunaan pendekatan kebutuhan dasar seperti yang dipakai oleh BPS tersebut, menurut Sriharini (2007: 112) memiliki 3 (tiga) kelemahan. *Pertama*, berkaitan dengan konsep, di mana kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur hanya dari sisi pengeluaran perkapita. Kelemahan ini sangat melekat pada pengukuran kemiskinan absolut, padahal kemiskinan sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi. *Kedua*, dari segi metodologi pengukuran. Metode BPS dikritik karena kurang memperhatikan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. *Ketiga*, masih adanya perdebatan tentang pengukuran nilai standart minimal.

Pengukuran garis kemiskinan lain yang cukup dikenal adalah garis kemiskinan Sajogyo, yang mengukur garis kemiskinan dengan didasarkan atas harga beras. Sajogyo (dalam Sriharini, 2007: 111) mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi perkapita setahun yang sama dengan harga beras. Dari model pengukuran tersebut, maka dikenal 3 golongan orang yang dianggap miskin, yaitu (1) golongan paling miskin yang memiliki pendapatan per-kapita per-tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang; (2) golongan miskin sekali yang

memiliki pendapatan per-kapita per-tahun beras 240-360 kg; dan (3) lapisan miskin yang memiliki pendapatan beras per-kapita per-tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg. Hal ini berbeda dengan ukuran Bank Dunia (dalam Soekarni, 2005: 128) yang menetapkan batas garis kemiskinan adalah US\$ 1 per-orang per-hari bagi negara-negara berkembang dan US\$2 per-orang per-hari bagi negara-negara maju. Dari berbagai macam cara pengukuran garis kemiskinan di atas, tampaknya ukuran-ukuran tersebut cenderung bersifat ekonomis semata. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, pemerintah Indonesia tetap menggunakan standar BPS.

Menurut Sriharini (2007: 114), kemiskinan itu bersifat multidimensional, sehingga kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan material semata, namun juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) dimensi yang terkait dengan kemiskinan, yaitu: (1) kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan; (2) kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan, yang disebut 'budaya kemiskinan' demi kelangsungan

hidup mereka. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib dan kurang memiliki etos kerja; dan (3) kemiskinan berdimensi struktural atau politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dikemukakan oleh Sriharini (2007: 114-115) adalah sebagai berikut: (1) rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki; (2) rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya fikir dan prakarsa; (3) Terbatasnya lapangan kerja. Kondisi kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja; dan (4) kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomis tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Keempat faktor penyebab kemiskinan tersebut di atas menunjukkan adanya lingkaran

kemiskinan.

Berkaitan dengan fenomena kemiskinan di Indonesia, pada umumnya, mereka yang tergolong miskin adalah kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah dan hidup di daerah pinggiran. Karena berpendidikan rendah dan menempati sektor geografis yang jauh dari penguasaan aset-aset produksi, maka sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh pendidikan layak. Akibatnya produktifitasnya pun rendah sehingga upah/gaji yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kedua aspek ini melingkar-lingkar terus dan jarang bisa ditemukan titik tempat pemberhentiannya. Kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah merupakan faktor yang saling terkait dan menjadi sebab akibat dari rendahnya produktifitas ekonomi. Akibatnya pula, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin pada generasi berikutnya. Upah/gaji yang rendah juga menghambat pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan membatasi peran serta penduduk miskin dalam kegiatan pembangunan (Sriharini, 2007: 116).

Upaya BMT dalam Mengentaskan Kemiskinan

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) terdiri dari 2 (dua) istilah, yaitu *baitul*

mal dan *baitul tamwil*. *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT (Sudarsono, 2004: 96).

Senada dengan konsep di atas, Amin Aziz (dalam Tahir, 2004: 4) mendefinisikan BMT sebagai "Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul mal wat tamwil*. Dari segi *baitul mal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infaq dan shadaqoh untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat kecil, fakir dan miskin. Sedang pada aspek *baitul tamwil*, BMT mengembangkan aspek-aspek produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya".

Keberadaan *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) atau *micro finance syari'ah* sempat mengalami pasang surut. Pada pertengahan 1990-an di saat pemerintahan Presiden Suharto, jumlah BMT sempat mencapai 3.000 unit. Namun, pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif dilaporkan tinggal 2.017 unit. Meskipun demikian, menurut laporan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai pertengahan

tahun 2006, jumlah BMT kembali bertambah menjadi sekitar 3.200 unit. Secara keseluruhan, BMT ini melayani anggota atau calon anggota yang mencapai 3 juta orang (Susanto dan Cahyadin, 2008: 74).

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, di antaranya yang paling krusial adalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum koperasi sehingga secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. BMT-pun mau tidak mau harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu. Konsekuensinya, tidak saja sebagian calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota, baik yang lama maupun yang sama sekali baru dan tidak memahami visi BMT memiliki hak suara yang sama. Sementara, jika BMT ingin dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung, maka BMT harus berganti status hukum menjadi bank atau lembaga keuangan non bank, seperti modal ventura. Konsekuensinya, BMT justru akan kehilangan keunggulan utamanya sebagai lembaga keuangan syariah yang melayani usaha berskala mikro (Susanto dan Cahyadin, 2008: 75).

Budiharjo (dalam Tahir, 2004: 5) mengemukakan 5 (lima) fungsi BMT sebagai berikut: (1) mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global; (2) mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah; (3) mengembangkan kesempatan kerja; (4) ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah; dan (5) memperkokoh usaha anggota.

Berkaitan dengan fungsi BMT dalam perekonomian nasional, Tahir (2013: 5) mengemukakan bahwa memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa dengan cara konvensional. Sebab usaha mikro itu merupakan usaha yang informal, yang jauh dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan, audit dan kepemilikan asset seperti tanah, rumah yang biasa digunakan jaminan. Oleh karena itu cara yang paling efektif bagi memberdayakan UMKM adalah melalui lembaga keuangan mikro yang menggunakan sistem syariah seperti BMT. Pemberdayaan UMKM ini dapat meningkatkan usaha para nasabah/anggota, sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Widyaningrum (dalam Susanto dan Cahyadin, 2008: 78) mengungkapkan 4 (empat) karakter BMT yang menjadikan

praktik lembaga ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya dan lebih berimplikasi pada masyarakat kecil. *Pertama*, BMT menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedurnya. *Kedua*, BMT hanya menuntut persyaratan yang ringan. *Ketiga*, BMT memberikan pelayanan yang cepat. *Keempat*, BMT menerapkan sistem 'jemput bola' dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya.

Beberapa riset telah menunjukkan peran BMT sangat vital dalam pengembangan usaha nasabah/anggotanya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memiliki andil pula dalam mengentaskan kemiskinan. Firmansyah (dalam Susanto dan Cahyadin, 2008: 78) menganalisis peran BMT terhadap perkembangan usaha 295 nasabah yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sejak menjadi nasabah BMT, sebagian responden telah merasakan dampak positif atas perkembangan usaha mereka. Perkembangan ini berupa peningkatan omzet penjualan, peningkatan keuntungan rata-rata dan peningkatan aset usaha setelah sebagian keuntungan digunakan untuk memperbesar modal usaha yang dimiliki.

Saridu (dalam Susanto dan Cahyadin, 2008: 79) dalam risetnya juga menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* memberi

peningkatan jumlah keuntungan dan nilai aset usaha yang dialami nasabah, meskipun masih belum mampu melampaui nilai inflasi pada saat itu. Namun demikian, pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan BMT Bina Dhuafa Beringharjo dapat membantu nasabah untuk mempertahankan taraf hidup mereka di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil.

Last but not least, saat ini penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadi suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan problem kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi semata, melainkan juga sosial, budaya dan politik. Peran BMT dengan karakteristik uniknya sangat diperlukan dalam mengembangkan kesempatan kerja, ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah serta ikut andil dalam memberdayakan UMKM dalam meningkatkan usaha para nasabah/anggota, sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014.
Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
Soekarni, Muhammad, "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam

Islam”, *Kebijakan “Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 111-140.

Sriharini, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin”, dalam *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam, Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007, hlm. 109-128.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Susanto, Akhmad Akbar dan Cahyadin, Malik, “Praktek Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perekonomian”, dalam *Jurnal Muamalah, Shariah Economic Forum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 5, Februari 2008, hlm. 65-86.

Tahir, Toto, “Eksistensi BMT (Baitul Mal wat Tamwil) sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, dalam *Kapita Selekta Hukum Masalah Bisnis dalam Kajian Hukum*, Bandung: Penerbit Fakultas Hukum Unisba, 2004.